

BAB II

KEAMANAN MARITIM REGIONAL DAN ANCAMAN DI SELAT MALAKA

Bab ini membahas dua pokok penting tentang keamanan maritim regional khususnya di Asia Tenggara dan ancaman kejahatan lintas negara. Isinya adalah mengulas perkembangan isu-isu keamanan serta ancaman maritim termasuk tindak kejahatan transnasional di Selat Malaka.

2.1. Keamanan Maritim Regional

Dalam lingkup keamanan maritim regional di Asia Tenggara dan Pasifik, beberapa negara mulai mencari pengaruh untuk menjadi negara yang diperhitungkan di bidang politik, militer dan ekonomi. Kategorisasi negara ini yakni Jepang, Korea Utara, China, Australia, Thailand, Pakistan dan India. Negara-negara tersebut sedang meningkatkan anggaran militer, pembaruan sistem persenjataan dan meningkatkan status militernya menjadi kekuatan maritim yang handal. Bahkan Cina dalam rencana duapuluh tahun ke depan sedang mempersiapkan armada lautnya hingga ke tingkatan *blue water navy*.

Di samping perlombaan kekuatan militer, masyarakat di Asia-Pasifik termasuk di lingkungan ASEAN sesungguhnya telah membangun kepercayaan melalui *Confidence Building Measures* (CBM) dalam *ASEAN Regional Forum* (ARF). Kerjasama pembentukan ARF bertujuan menciptakan stabilitas keamanan di kawasan Asia dan Pasifik. Bantarto Bandoro (2002) mengungkapkan bahwa harapan besar akan regionalisme Asia-Pasifik yang mencakup Asia Timur dan Asia Tenggara, telah muncul dari pertemuan bulan Juli 2000 antar para Menteri Luar Negeri ASEAN.⁵⁴

Memang masih ada potensi konflik diantara negara-negara tersebut seperti: masalah Semenanjung Korea, klaim teritorial antara Rusia-Jepang, Cina-

⁵⁴ Bantarto Bandoro, "Unilateralisme AS dan ASEAN Regional Forum", Jurnal Analisis CSIS, Jakarta, Tahun XXXI/2002, hal 96.

Jepang, serta klaim Cina dengan beberapa negara anggota ASEAN terhadap Kepulauan Spratly dan Paracel, termasuk dalam hal ini belum tuntasnya delimitasi perbatasan negara antara Indonesia-Malaysia di Selat Malaka. Hal ini menjadi residu permasalahan di antara negara-negara Asia-Pasifik yang telah menimbulkan implikasi buruk terhadap stabilitas keamanan maritim di kawasan ini.⁵⁵

Selanjutnya, Edy Prasetyono (2008) mengungkapkan bahwa operasi terorisme dan kejahatan transnasional telah berhasil mengeksploitasi sifat wilayah Asia Tenggara yang terbuka.⁵⁶ Banyak wilayah yang tidak sepenuhnya dikontrol pemerintah, mengakibatkan sebagian besar (80%) penyelundupan senjata dilakukan melalui laut menuju daerah-daerah konflik di negara-negara kawasan Asia Tenggara.

Untuk itu, dipandang perlu merumuskan ancaman-ancaman keamanan yang datang baik dari perlombaan peningkatan anggaran dan persenjataan militer maupun melalui tindak kejahatan transnasional di kawasan Asia Tenggara dan Pasifik. Untuk kerjasama setingkat Asia-Pasifik, justru ASEAN menjadi pelopor dalam instrumen diplomatik terutama penyelesaian masalah secara damai melalui *Treaty of Amity and Cooperation* (TAC). Tujuan dibentuknya TAC adalah untuk mempromosikan perdamaian abadi di kawasan Asia Tenggara yang selalu mengedepankan kerjasama yang erat dengan sesama masyarakat ASEAN serta memberikan kontribusi yang kuat, solidaritas dan persahabatan antarnegara.

Bahkan dalam perkembangannya, sejak disepakati oleh negara-negara ASEAN pada tahun 1976, hingga saat ini negara-negara non-ASEAN telah melakukan aksesi terdiri dari Papua New Guinea, Cina, India, Jepang, Korea

⁵⁵ Kent E. Calder, "Asia's Deadly Triangle", London, 1996.

⁵⁶ Edy Prasetyono, "Prospek dan Tantangan Hubungan Keamanan Indonesia-Thailand", *Roundtable Discussion* Departemen Luar Negeri RI, Jakarta 23 April 2008.

Selatan, Pakistan, Rusia, Mongolia dan Selandia Baru. Dalam perkembangannya, Timor Leste menyatakan juga keinginan turut ambil bagian dalam TAC.⁵⁷

Dalam hal ini tergambar jelas peran ASEAN baik melalui CBM-ARF maupun TAC. Di samping TAC, ASEAN *Vision 2020* merupakan promosi keamanan saat ini. Secara simbolik visi ASEAN 2020 adalah “sebuah kesatuan bangsa-bangsa Asia Tenggara yang memiliki pandangan ke depan, hidup dalam perdamaian, stabilitas dan kemakmuran, terikat bersama dalam sebuah komunitas yang saling peduli”. Visi ASEAN 2020 ini kemudian diwujudkan dalam bentuk sebuah Komunitas ASEAN (ASEAN *Community*) yang memiliki tiga pilar yaitu Komunitas Keamanan ASEAN (ASEAN *Security Community/ASC*), Komunitas Ekonomi ASEAN (ASEAN *Economic Community/AEC*), dan Komunitas Sosial-budaya ASEAN (ASEAN *Socio-cultural Community/AScC*).

Komunitas ASEAN merupakan upaya evolusi ASEAN dalam menyesuaikan cara pandang ASEAN agar dapat lebih terbuka membahas permasalahan dalam negeri yang berdampak kepada kawasan tanpa meninggalkan prinsip-prinsip utama dalam ASEAN yaitu *mutual respect, non-interference, consensus, dialogue and consultation*.⁵⁸

ASC mencerminkan komitmen negara-negara ASEAN untuk memperkuat dan meningkatkan kerjasama politik-keamanan. ASC didasarkan pada prinsip-prinsip *non-interference*, pembuatan keputusan berdasarkan konsensus, ketahanan nasional dan regional, penghormatan atas kedaulatan nasional, penolakan (*renouncement*) penggunaan ancaman kekuatan, serta penyelesaian sengketa secara damai. Khusus dalam hal ketahanan regional, Indonesia berpandangan bahwa hal tersebut merupakan masalah yang sangat fundamental bagi upaya menghindari intervensi asing dalam penyelesaian masalah di kawasan.

⁵⁷ “ASEAN *Selayang Pandang*”, Dirjen Kerjasama ASEAN Departemen Luar Negeri RI, Jakarta, 2005.

⁵⁸ Baca juga Amris Hassan “ASEAN sebagai *Stabilisator Wilayah Asia Tenggara*” dalam *Perkembangan Studi Hubungan Internasional dan Tantangan Masa Depan*, Pustaka Jaya, 1996.

Dalam hal ini, keamanan di kawasan merupakan modal pembentukan stabilitas dan daya dukung antarnegara ASEAN untuk bekerjasama dan melakukan kontra internasionalisasi oleh pihak lain khususnya intervensi dan sekuritisasi.⁵⁹

Lebih lanjut lagi, menurut Anak Agung Banyu Perwita (2005) dalam perspektif keamanan, jika melihat gangguan dan tantangan keamanan maritim secara nasional maupun regional maka konflik antarnegara (*inter-state conflict*) merupakan permasalahan yang harus di respons dengan serius. *Inter-state conflict* akan memicu tingkat kompetensi antarnegara untuk memperoleh sumber daya alam berdasarkan klaim terhadap batas-batas nasional maupun teritorial.

Secara spesifik, hal yang perlu dilakukan oleh negara-negara di kawasan Asia Tenggara yakni penyelesaian batas teritorial antarnegara. Sebaliknya, secara internal, Indonesia perlu melakukan pengkajian kembali dan penyesuaian garis-garis pangkal pantai (*internal waters*) dan alur laut nusantara (*archipelagic seelanes*). Hal ini perlu dilakukan sebab Indonesia masih mengalami kendala dalam penentuan batas wilayah perairan laut dengan Filipina, Malaysia, Singapura, Vietnam dan Timor-Leste. Selain pengelolaan batas teritorial, ZEE dan alur laut nusantara, yang tak kalah penting adalah pengelolaan lingkungan keamanan laut khususnya di Selat Malaka.⁶⁰

Pandangan lainnya tentang keamanan di Asia Tenggara tercermin dalam argumentasi Ralf Emmers. Emmers (2007) mengungkapkan bahwa aturan keamanan ASEAN sebagai '*collective strategy*' tidak dapat dipakai dalam kerangka perang melawan serangan terorisme dan perompakan di laut.⁶¹ Emmers berpendapat bahwa respon terhadap kejahatan terorisme dan perompakan laut memerlukan kerjasama di tingkat nasional dan antarkawasan yang dapat berbentuk bilateral maupun trilateral.

⁵⁹ "ASEAN Selayang Pandang", hal 174.

⁶⁰ Anak Agung Banyu Perwita, "Koordinasi dan Kerangka Pengelolaan Keamanan di Selat Malaka secara Terpadu", Deplu, 2005.

⁶¹ Ralf Emmers, "Comprehensif Security and Resilience in Southeast Asia: ASEAN's Approach to Terrorism and Sea Piracy," S. Rajaratnam School of International Studies, Singapore, 2007.

Mekanisme keamanan ASEAN memang belum sepenuhnya dapat merumuskan aturan-aturan dalam hal melawan terorisme dan perompakan laut. Namun, Emmers mengatakan bahwa ASEAN dapat menjadi payung besar dan media konsultatif dimana dapat memperkaya argumentasi ketika berhadapan dengan negara-negara besar seperti AS, Cina, Jepang dan India. Dalam tingkatan konsultatif itulah ASEAN diperlukan karena memiliki peran politik yang sangat signifikan.

Pendasaran pandangan Emmers ini adalah dengan membangun argumentasinya melalui isu-isu teroris dan perompakan dimana aktor militansi dan aktifitas separatisme serta gerakan radikal keagamaan merupakan akar kekerasan yang terjadi di beberapa negara ASEAN. Pendekatan Emmers dilakukan dengan menampilkan aktor Abu Sayaf dan *MORO Islamic Liberation Front* di Filipina, Laskar Jihad dengan konflik agama di Maluku, teror bom Bali dan Bom Kuningan di Jakarta dan sejumlah aksi-aksi Jamaah Islamiah serta usaha-usaha dalam membentuk Pan-ASIAN Islamic.

Selanjutnya, kajian Emmers menjelaskan bahwa paska penyerangan WTC-9/11 Presiden Megawati Sukarnoputri pernah melakukan kunjungan singkat ke Washington dan berjanji mendukung kampanye anti-teroris. Dalam pandangan penulis, hal inilah tepat dijadikan contoh proses terjadinya ‘sekuritisasi isu’ di kawasan perairan Selat Malaka. Ketika kemampuan komponen negara tidak dapat melakukan perlawanan atas kejahatan lintas negara, maka isu-isu keamanan dibawa pada pernyataan politik dan dilakukan oleh aktor pemimpin politik dalam hal ini bisa saja presiden, anggota DPR, maupun pejabat setingkat menteri.⁶²

2.2. Ancaman Keamanan di Selat Malaka

Secara geografis Selat Malaka membentang sepanjang 500 mil laut berada di antara semenanjung Malaya dan Pulau Sumatera. Lebar alur masuk Selat Malaka di sebelah Utara adalah sekitar 220 mil laut dan berakhir pada ujung

⁶² Contoh lain adalah pernyataan Laksamana Fargo yang menghebohkan hubungan Indonesia dan AS, bahwa jika Indonesia tidak mampu mengatasi perompakan di Selat Malaka maka AS siap membantu dan mengawal kapal-kapal domestik yang melintasi perairan tersebut.

sebelah Selatan yang merupakan wilayah tersempit (*the narrowest point*) yaitu sekitar 8 mil laut. Selat Malaka bersambungan dengan Selat Singapura yang mempunyai panjang selat kurang lebih 60 mil laut.

Dalam konstelasi geografis, Selat Malaka dan Selat Singapura mempunyai alur pelayaran sempit dan terdapat pulau-pulau kecil yang justru memberikan peluang terjadinya tindak kejahatan di laut. Selat Malaka juga merupakan salah satu dari 13 selat strategis di dunia yang menghubungkan Asia dan Pasifik, serta Amerika dan Afrika.

Adapun selat strategis lainnya adalah Selat Bab el Mandab yang menghubungkan Laut Merah dan Laut Arabia, Selat Bosphorus yang menghubungkan Laut Hitam dan Laut Marmara, Selat Dardanelles di Turki, Selat Dover yang menghubungkan Terusan Inggris dan Laut Utara, Selat Hormuts yang menghubungkan Semenanjung Arab - Semenanjung Oman dan Laut Arabia, Selat Gibraltar sebagai pemisah antara Benua Afrika dan Benua Eropa, Terusan Suez di Mesir dan terusan Panama.

Teratat bahwa untuk kawasan perairan kawasan Asia Pasifik lintasan SLOC yang terpadat adalah Selat Malaka, dimana dilewati oleh 72 % tanker yang melintas dari Samudera Hindia ke Pasifik.⁶³ Selanjutnya, data Departemen Energi Amerika Serikat telah menghitung bahwa jika Selat Malaka dan Selat Singapura ditutup maka hampir separuh armada pelayaran dunia akan menggunakan jalur memutar serta akan memodifikasi kapal-kapalnya untuk meningkatkan kapasitas angkut. Akibatnya, di samping waktu pendistribusian menjadi lebih lama, juga *cost transportation* menjadi lebih mahal dan dipandang dari sudut ekonomi, hal ini merupakan hal yang sangat merugikan.⁶⁴

Sebagai selat yang digunakan untuk pelayaran internasional maka keamanan alur dan keselamatan kapal-kapal yang melintasi selat ini merupakan tanggung jawab negara pantai. Jaminan keamanan ini sangat penting mengingat faktor keamanan dapat menjadi isu yang krusial bagi kehidupan masyarakat internasional. Sebagai tiga negara yang secara trilateral bertanggung jawab untuk

⁶³ Edhi Nuswantoro, *ibid.*, hal 21-23.

⁶⁴ “*Strait of Malacca: Security Implication*”, sumber. www.saag.org.

menjamin keamanan kapal-kapal yang melintasi di selat Selat Malaka, maka Indonesia, Malaysia dan Singapura harus memiliki komitmen yang kuat dan landasan kerjasama yang jelas serta akurat. Hal ini tampaknya belum dirasakan adanya jaminan keamanan pelayaran yang terkontrol, sebagaimana desakan negara-negara pengguna Selat Malaka.⁶⁵

Sementara itu, terkait *expose dark water* terhadap perairan Indonesia, khususnya Selat Malaka hingga perairan Natuna tentu sangat merugikan Indonesia. Hal ini justru dilakukan oleh negara-negara pengguna selat. Bahkan secara nyata, Jepang telah meminta hak pengamanan khusus bagi jalur laut hingga Perairan Natuna untuk melindungi kepentingan perdagangannya. Hal ini dipastikan bisa juga diikuti oleh negara-negara lain yang berkepentingan di Selat Malaka hingga perairan Natuna.

Masalah lainnya yang muncul adalah sekitar awal bulan April 2004. Dalam rapat dengar pendapat di kongres AS, Panglima Komando Armada Pasifik, Laksamana Thomas Fargo mengungkapkan bahwa AS berencana mengerahkan pasukan marinir dan armada khusus yang menggunakan kapal berkecepatan tinggi di Selat Malaka. Pengerahan armada khusus ini merupakan murni prakarsa Washington untuk memerangi terorisme di kawasan Asia Tenggara.⁶⁶

Namun dua minggu berikutnya, pada pertengahan April 2004 Dubes AS untuk Indonesia memberikan konfirmasi meluruskan pernyataan Panglima Komando Armada Pasifik tersebut. Dubes Amerika untuk Indonesia menyatakan bahwa sesungguhnya Pemerintah Amerika berniat hendak melakukan kerjasama dengan negara selat dalam hal memerangi masalah kejahatan maritim dan aksi-aksi terorisme.⁶⁷

Dalam perkembangan selanjutnya, persoalan tersebut dibahas secara informal hingga tidak sampai pada *agreement* resmi tertulis antara pemerintah RI dengan AS. Melihat perkembangan yang rawan terhadap isu-isu keamanan di Selat Malaka, setidaknya fenomena di atas telah membuktikan usaha pihak asing

⁶⁵ “*Kerawanan di Selat Malaka*”, www.unisosdem.org,

⁶⁶ Djoko Sumaryono “*Kerawanan di Selat Malaka*”, www.kompas.co.id.

⁶⁷ *Ibid.*, Djoko Sumaryono.

dalam melakukan regionalisasi dan internasionalisasi masalah keamanan di Selat Malaka.

Sebagaimana dijelaskan pada bab sebelumnya, bahwa Selat Malaka memiliki eksistensi terpenting sebagai jalur pelayaran yang digunakan secara internasional, maka sangat logis jika perkembangan isu-isu keamanan perairan menempatkan Selat Malaka sebagai topik sentral di kawasan Asia Pasifik.

Relevansi posisi Selat Malaka ini jika dihadapkan dengan perkembangan lingkungan strategis global, regional maupun nasional akan menciptakan korelasi bersifat kausalitas antara situasi yang cenderung saling mempengaruhi baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, sangat logis jika eksistensi Selat Malaka turut menjadi faktor pertimbangan geo-strategi, geo-politik maupun geo-ekonomi bagi kepentingan seluruh negara di dunia.

Di samping itu, yang perlu dipahami bahwa keamanan di Selat Malaka sesungguhnya bukan terletak pada patroli keamanan semata namun mengandung pengertian bahwa Selat Malaka harus bebas dari ancaman maupun gangguan terhadap aktifitas pemanfaatannya.

Oleh karena itu, beberapa syarat yang harus dipenuhi sehingga Selat Malaka bebas dari proses sekuritisasi atau internasionalisasi, adalah:⁶⁸

- a. Selat Malaka bebas dari ancaman kekerasan yang menggunakan kekuatan bersenjata terorganisir, serta yang memiliki kemampuan untuk mengganggu dan membahayakan personel atau negara. Ancaman tersebut dapat berupa pembajakan, perompakan, sabotase obyek vital, peranjauan, hingga aksi teror bersenjata.
- b. Selat Malaka bebas ancaman navigasi yang ditimbulkan oleh kondisi geografi dan hidrografi serta kurang memadainya sarana bantu navigasi, seperti menara suar, sistem radar dan lain-lain, sehingga dapat membahayakan keselamatan pelayaran.
- c. Selat Malaka bebas ancaman kerusakan lingkungan dan sumber daya laut, yakni pencemaran dan perusakan ekosistem laut, eksploitasi yang

⁶⁸ Edhi Nuswantoro, *opcit.*, hal 23.

berlebihan serta konflik pengelolaan sumber daya laut. Fakta menunjukkan bahwa konflik pengelolaan sumber daya (jalur selat) memiliki kecenderungan mudah dipolitisasi dan selanjutnya akan diikuti dengan penggelaran kekuatan militer.

- d. Selat Malaka bebas dari pelanggaran hukum, yaitu pelanggaran hukum nasional maupun internasional, seperti *illegal fishing*, *illegal logging*, *illegal migrant*, penyelundupan dan lain-lain.

Bertitik tolak dari persepsi tersebut sangatlah jelas bahwa keamanan Selat Malaka memiliki lingkup yang cukup luas, sehingga memerlukan organisasi, manajemen, serta sarana dan prasarana yang memadai.

Selanjutnya, dalam forum *The 2nd Assean Annual Senior Officials Meeting On Transnational Crime* yang diselenggarakan pada tanggal 17 Mei 2002 di Kuala Lumpur, Malaysia dengan topik “*Work Programme to Implement The ASEAN Plan of Action to Combat Transnational Crime*,” diperoleh kesepakatan sebanyak delapan jenis kejahatan lintas negara (*transnational crimes*), yaitu:

- 1) Perdagangan Gelap Narkotika (*Illicit Drug Trafficking*).
- 2) Perdagangan Manusia (*Trafficking In Persons*)
- 3) Perompakan di Laut (*Sea-Piracy*).
- 4) Penyelundupan Senjata (*Arms Smuggling*).
- 5) Pencucian Uang (*Money Laundering*).
- 6) Terorisme (*Terrorism*).
- 7) Kejahatan Ekonomi Internasional (*International Economic Crime*).
- 8) Kejahatan Dunia Maya (*Cyber Crime*).⁶⁹

Kesepakatan tersebut pada dasarnya tidak hanya berlaku secara regional, namun sudah menjadi komitmen masyarakat internasional untuk melawan kejahatan lintas negara yang terorganisir dan memiliki jaringan global.

⁶⁹ www.deplu.go.id.

Menurut James Laki, *transnational crime* adalah keseluruhan bentuk kejahatan domestik yang terjadi di perbatasan internasional dalam satu negara atau lebih dan mendapatkan fokus perhatian masyarakat internasional.⁷⁰ Laki menambahkan bahwa faktor sosial dan ekonomi serta struktur yang lemah dari negara adalah penyebab terjadinya kejahatan transnasional.⁷¹

Di lain sisi, pengertian kejahatan transnasional mengandung arti tindakan kriminal yang dilakukan antara negara oleh pelaku baik secara individu, kelompok, sindikat yang menggunakan jaringan lintas negara dengan tujuan dan keuntungan tertentu. Kejahatan transnasional dapat juga melewati jalur resmi, pemerintah dan non-pemerintah yang mempergunakan kelemahan Undang-Undang Nasional di suatu negara atau negara lainnya dengan upaya transbisnis atau keuangan, *trans-trading*, *trafficking*, *trans-logging*, *trans-fishing*, *arms* dan *trans-document*.⁷² Kejahatan transnasional dapat mengakibatkan kerugian bagi negara, masyarakat dan korban atau individu yang terlibat dan dilibatkan dalam kejahatan tersebut.

Dalam hal ini, bahwa masalah keamanan Selat Malaka merupakan masalah yang saling kait-mengkait, yaitu kepentingan dan kedaulatan nasional dalam hal ini negara pantai, serta kepentingan internasional atau negara pengguna selat. Oleh karena itu, wajar terjadi pola sekuritisasi isu di Selat Malaka apabila melihat potensi ancaman tersebut yang terus berlangsung dan tidak dapat dilunakkan.

Selanjutnya, menurut Refqi Muna sekuritisasi adalah bagian dari revolusi keamanan dalam negeri yang menjelaskan berbagai landasan politik ketika meninjau isu-isu keamanan. Muna berpendapat bahwa konsep sekuritisasi dapat dengan mudah disalahgunakan oleh rezim yang otoriter atas nama kebebasan sipil. Dalam kesimpulannya, Muna menekankan agar sekuritisasi di Selat Malaka

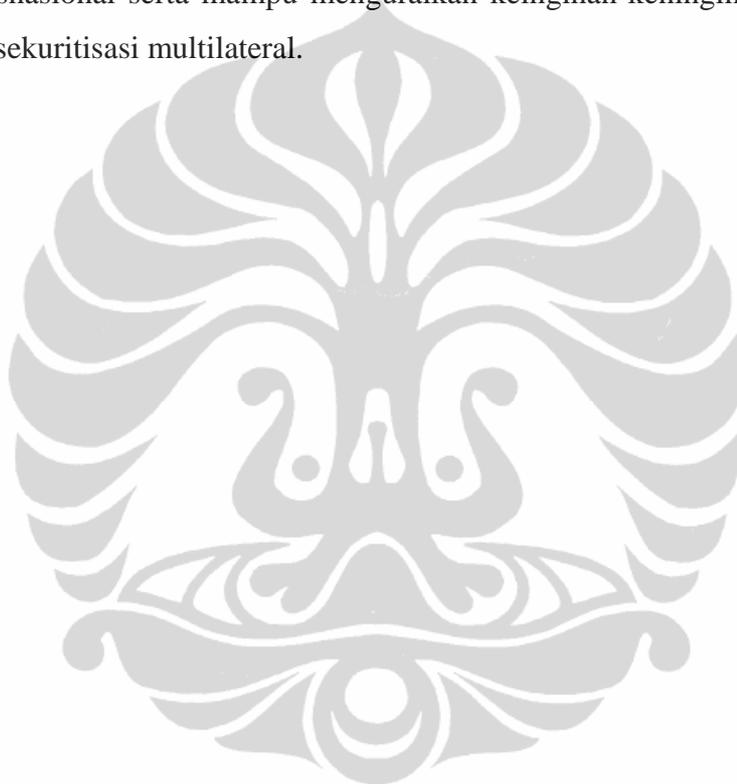
⁷⁰ James Laki, "*Non-traditional Security Issues: Securitisation of Transnational Crime in Asia*". Research Paper Nanyang Technological University, Singapore.

⁷¹ James Laki, "*Securitization of Transnational Crimes*", Laporan Workshop Institute of Defence and Strategic Studies (IDSS), Singapore, 2005.

⁷² Konsepsi Strategi Penanganan Masalah Selat Malaka, Mabes AL-Jakarta, 2005.

dapat berhasil maka langkah pertama yang harus dianalisis adalah membahas isu-isu ancaman keamanan di Indonesia.⁷³

Melihat perkembangan ancaman keamanan dan diskusi sekuritisasi di atas, maka sangat diperlukan pengkajian aplikasi konsep keamanan maupun mekanisme kontrol di lapangan. Hal ini merupakan pintu masuk untuk meneliti apakah konsep kerjasama keamanan di Selat Malaka dapat mengatasi isu-isu ancaman transnasional serta mampu menguraikan keinginan-keinginan kolektif yang bersifat sekuritisasi multilateral.



⁷³ Refqi Muna, “*Securitization of Transnational Crime*”, Laporan Seminar *Institute of Defence and Strategic Studies* (IDSS), Singapore. 2004.